

PENDIDIKAN SEBAGAI FONDASI PENINGKATAN KUALITAS SDM: PENDEKATAN PARTICIPATORY ACTION RESEARCH DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN UMKM DI DESA SUMBER KEMUNING

M. Farhan Abid Pratama¹, Airlangga Bramayudha^{2*}, Ahmad Faiz³, Andrian Maulana⁴, Imam Nur Rochim⁵, Achmat Izzat Ali⁶

¹ Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

² Prodi manajemen dakwah fakultas dakwah dan komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya

³ Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya

⁴ Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya

⁵ Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

⁶ Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel Surabaya

*Corresponding Author: bram@uinsa.ac.id

Article Info

Article History:

Received August 12, 2026

Revised September 11, 2026

Accepted September 24, 2026

Keywords:

*Participatory Action Research,
human resource quality,
education,
environmental health,
MSMEs*

ABSTRAK

Kemiskinan ekstrem merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses pendidikan, lemahnya kesadaran terhadap kesehatan lingkungan, dan belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Kegiatan ini menganalisis penerapan pendekatan Participatory Action Research (PAR) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan, inisiatif kesehatan lingkungan, dan pemberdayaan UMKM di Desa Sumber Kemuning. Pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang meliputi diagnosis, perencanaan, aksi, observasi, refleksi, dan evaluasi secara kolaboratif bersama masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, diskusi, dokumentasi, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan sosial-emosional pada tahap awal membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Edukasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) memperluas literasi pendidikan dan akses informasi mengenai pendidikan tinggi. Inisiatif lingkungan melalui kerja bakti dan media edukasi mendorong kesadaran kolektif terhadap kebersihan. Pemetaan spasial UMKM dan papan informasi potensi desa meningkatkan visibilitas usaha lokal. Pendekatan PAR efektif memperkuat kapasitas sumber daya manusia, modal sosial, dan pembangunan desa berkelanjutan.

ABSTRACT

Extreme poverty was a multidimensional problem associated with low human resource quality, limited access to education, weak environmental health awareness, and underutilized local economic potential. This study analyzed the application of the Participatory Action Research (PAR) approach to improve human resource quality through educational programs, environmental health initiatives, and MSME empowerment in Sumber Kemuning Village. The activities used a participatory approach involving diagnosis, planning, action, observation, reflection, and evaluation conducted collaboratively with the community. Data were collected through field observation, interviews, discussions, documentation, and direct participation in community activities. The findings showed that an initial socio-emotional approach built trust and increased community participation. Education on the Smart Indonesia Card for College (KIP-K) expanded educational literacy and access to information about higher education. Environmental initiatives, including communal work and educational media, encouraged collective awareness of cleanliness. Spatial mapping of MSMEs and village potential information boards improved the visibility of local businesses. The study concluded that PAR was effective in strengthening human resource capacity, social capital, and sustainable village development by positioning communities as development subjects.

Copyright © 2026, The Author(s).
This is an open access article under the
CC-BY-SA license



How to cite: Pratama, M. F. A., Bramayudha, A., Faiz, A., Maulana, A., Rochim, I. N., & Ali, A. I. (2026). PENDIDIKAN SEBAGAI FONDASI PENINGKATAN KUALITAS SDM: PENDEKATAN PARTICIPATORY ACTION RESEARCH DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN UMKM DI DESA SUMBER KEMUNING. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 5(3), 502–510. <https://doi.org/10.55681/devote.v5i3.7121>

PENDAHULUAN

Kemiskinan ekstrem merupakan problematika multidimensi yang pada dasarnya berakar pada rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Keterbatasan kapasitas SDM ini menciptakan efek domino yang melumpuhkan pilar-pilar esensial kehidupan masyarakat, khususnya pada sektor kesehatan lingkungan dan ketahanan ekonomi mikro (UMKM). Tanpa fondasi pendidikan yang memadai, masyarakat cenderung abai terhadap kondisi kebersihan di sekitarnya dan kehilangan daya adaptasi dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Oleh karena itu, penyelesaian masalah kemiskinan ekstrem tidak dapat dilakukan secara parsial atau sekadar melalui pembangunan fisik, melainkan membutuhkan pendekatan holistik yang menempatkan edukasi sebagai fondasi utama peningkatan kualitas SDM, guna menyentuh akar kesadaran, kebiasaan, dan kondisi emosional masyarakat itu sendiri (Morgan, 2006; UNESCO, 2021; Yusri, 2022).

Realitas stagnansi ini tergambar jelas di Desa Sumber Kemuning, di mana permasalahan lingkungan, ekonomi, dan status sosial masyarakat terbukti saling berkaitan erat dan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Akar utama dari kemiskinan ekstrem di desa ini bermuara pada fenomena tingginya angka putus sekolah dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang tuntas. Dampak dari rendahnya kualitas SDM ini termanifestasi secara nyata pada hilangnya kesadaran ekologis warga terhadap kesehatan lingkungan; salah satunya dibuktikan dengan tidak adanya riwayat kebiasaan gotong royong atau kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat sebelumnya. Di sektor ekonomi, upaya pengembangan UMKM menghadapi jalan buntu akibat kendala demografis. Mayoritas pemilik usaha merupakan kalangan lanjut usia (lansia) yang kesulitan menerima intervensi modernisasi dan digitalisasi, sehingga program pengembangan masa depan seringkali tidak selaras dengan kapasitas bawaan masyarakat desa. Tantangan adaptasi digital pada UMKM juga banyak dipengaruhi oleh kesiapan kapasitas pelaku usaha dan akses terhadap ekosistem digital (OECD, 2021; UNCTAD, 2021).

Dalam menghadapi kompleksitas yang telah mengakar tersebut, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) hadir sebagai sumbu utama dan katalisator perubahan melalui pendekatan sosial-emosional, dengan edukasi sebagai fondasi penyelesaian. Alih-alih memaksakan pembangunan fisik yang rentan terbengkalai, intervensi dimulai dengan membangun kedekatan emosional melalui partisipasi aktif dalam budaya lokal, seperti kontes sapi tingkat kabupaten dan kegiatan keagamaan, guna menumbuhkan rasa saling percaya. Berangkat dari ikatan emosional dan hasil evaluasi terhadap keberlanjutan program, intervensi dirancang ulang agar lebih adaptif terhadap kebiasaan masyarakat, memastikan bahwa setiap solusi yang diberikan tidak hanya selesai saat program KKN berakhir, tetapi mampu dikelola secara mandiri oleh desa. Orientasi partisipatif semacam ini sejalan dengan praktik pemberdayaan masyarakat melalui KKN dan PAR yang menempatkan masyarakat sebagai aktor aktif dalam proses perubahan (Chandra et al., 2026; Harahap et al., 2025).

Sebagai wujud konkret dari fondasi peningkatan kualitas SDM tersebut, KKN memposisikan edukasi sebagai jawaban atas tiga pilar permasalahan utama. Pertama, kebuntuan pada isu kesehatan lingkungan dipecahkan dengan menginisiasi kegiatan kerja bakti di Dusun Gunung Malang dan Dusun Waduk. Pendekatan emosional ini berhasil menembus apati warga, menjadikan kerja bakti sebagai embrio kebiasaan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kedua, kendala usia pada pengembangan UMKM disiasati dengan langkah taktis tanpa memaksakan digitalisasi rumit, yaitu melalui integrasi pemetaan batas dusun di Google Maps yang terhubung dengan papan informasi jumlah UMKM di setiap dusun, serta pembuatan luaran fisik berupa denah desa inklusif yang ditempatkan di Balai Desa. Ketiga, untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem dari akarnya, edukasi pendidikan, sosial, dan lingkungan dilebur menjadi satu narasi besar melalui sosialisasi program beasiswa KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah). Program beasiswa ini menjadi tujuan penunjang utama yang secara konkret memberikan jalan keluar bagi krisis SDM, memastikan generasi penerus Desa Sumber Kemuning memiliki kesempatan memutus siklus kemiskinan ekstrem melalui pendidikan yang tuntas. Penguatan akses pendidikan dipandang penting dalam

membangun kapasitas manusia dan memperluas peluang sosial-ekonomi masyarakat (UNESCO, 2021; Yusri, 2022).

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sumber Kemuning. PAR dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang tidak hanya mengidentifikasi persoalan, tetapi juga mendorong tindakan dan refleksi bersama masyarakat. Siklus kegiatan terdiri atas diagnosis, perencanaan, aksi, observasi, refleksi, dan evaluasi. Karakter siklik, reflektif, dan partisipatif tersebut merupakan ciri utama PAR dalam menghubungkan produksi pengetahuan dengan tindakan bersama masyarakat (Baum et al., 2006; Pain et al., 2011; Reason & Bradbury, 2008).

Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara dan percakapan dengan masyarakat serta perangkat desa, diskusi kelompok, dokumentasi, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan masyarakat. Proses diagnosis dilakukan melalui observasi lapangan dan interaksi sosial untuk mengidentifikasi persoalan pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. Hasil diagnosis kemudian dibahas dalam evaluasi internal tim dan dikonsultasikan dengan pemerintah desa serta pihak terkait. Program yang dipilih selanjutnya dilaksanakan, diamati, dan dievaluasi berdasarkan tingkat partisipasi, relevansi terhadap kebutuhan masyarakat, serta peluang keberlanjutannya. Pelibatan masyarakat secara langsung dalam pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan merupakan unsur penting dalam penelitian partisipatif (Cargo & Mercer, 2008; Wallerstein et al., 2018).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan temuan lapangan, proses pelaksanaan kegiatan, respons masyarakat, serta hasil refleksi. Fokus analisis diarahkan pada perubahan kapasitas masyarakat, penguatan partisipasi, terbentuknya modal sosial, serta keberlanjutan program. Fokus pada kapasitas dan proses partisipatif relevan karena pemberdayaan tidak hanya dinilai dari keluaran program, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan perubahan setelah intervensi selesai (Jagosh, 2012; Morgan, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Emosional sebagai Awal Pemetaan Masalah

Sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 1**, tahap awal PAR di Desa Sumber Kemuning dilakukan dengan membangun hubungan yang setara antara tim KKN, pemerintah desa, dan masyarakat. Silaturahmi dengan camat, kepala desa, perangkat desa, ketua RT, tokoh masyarakat, serta warga menjadi langkah penting untuk membangun komunikasi dan kepercayaan. Tim juga terlibat dalam berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan keagamaan, Posyandu, dan kegiatan sosial lainnya. Pendekatan tersebut memungkinkan tim memahami kondisi desa secara lebih mendalam daripada hanya mengandalkan data formal. Dalam penelitian partisipatif, hubungan saling percaya dan keterlibatan langsung menjadi prasyarat penting agar masyarakat dapat menyampaikan pengalaman serta kebutuhan secara lebih terbuka (Cargo & Mercer, 2008; Jagosh, 2012).



Gambar 1. Pendekatan masyarakat pada UMKM

Observasi menunjukkan tiga isu utama. Pertama, masih terbatasnya informasi mengenai pendidikan tinggi dan beasiswa. Kedua, belum optimalnya kebiasaan kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ketiga, potensi UMKM lokal belum terdokumentasi dan dipromosikan secara optimal. Ketiga persoalan tersebut kemudian dipahami sebagai bagian dari persoalan yang lebih luas, yaitu keterbatasan kapasitas masyarakat dalam memperoleh informasi, mengorganisasi tindakan kolektif, dan mengembangkan aset lokal. Pemahaman kapasitas sebagai kemampuan kolektif untuk mengelola sumber daya dan menjalankan perubahan menjadi dasar penting dalam pemberdayaan masyarakat (Morgan, 2006). Proses pembuatan gerabah sebagai salah satu potensi UMKM yang diamati selama pemetaan ditunjukkan pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Proses pembuatan gerabah

Pendekatan sosial-emosional berfungsi sebagai modal sosial dalam pelaksanaan program. Hubungan yang terbangun membuat masyarakat lebih terbuka dalam menyampaikan persoalan dan meningkatkan legitimasi sosial terhadap kegiatan KKN. Hasil diagnosis kemudian dibahas dalam rapat evaluasi tim sehingga prioritas program ditentukan berdasarkan kebutuhan lapangan, bukan semata-mata berdasarkan rencana awal. Dengan demikian, tahap diagnosis menghasilkan dasar perencanaan yang lebih adaptif dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan literatur tata kelola kolaboratif yang menempatkan kepercayaan, dialog, dan keterlibatan pemangku kepentingan sebagai unsur penting dalam membangun keputusan bersama (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012).

Edukasi Pendidikan (KIP-K) sebagai Solusi Hulu dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Hasil diagnosis menunjukkan bahwa keterbatasan akses pendidikan tinggi tidak hanya disebabkan oleh persoalan ekonomi, tetapi juga oleh rendahnya informasi mengenai jalur masuk perguruan tinggi dan program bantuan pendidikan. Sebagian masyarakat belum memahami mekanisme pendaftaran, persyaratan, serta peluang memperoleh KIP-K. Kondisi ini dapat membatasi kesempatan generasi muda untuk melanjutkan pendidikan dan memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi. Pendidikan memiliki peran penting dalam memperluas kapabilitas individu dan mengurangi kerentanan sosial-ekonomi, sehingga akses terhadap informasi pendidikan menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kualitas SDM (UNESCO, 2021; Yusri, 2022). Dokumentasi pemberian sertifikat kepada narasumber disajikan pada **Gambar 3**.



Gambar 3. Pemberian sertifikat kepada narasumber

Berdasarkan temuan tersebut, tim KKN menyusun program sosialisasi KIP-K melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait. Materi mencakup pentingnya pendidikan tinggi, persyaratan, mekanisme pendaftaran, serta peluang bantuan biaya pendidikan. Kegiatan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga dialogis. Peserta didorong untuk menyampaikan pertanyaan dan membahas hambatan yang selama ini membuat pendidikan tinggi dianggap sulit dijangkau. Pelaksanaan sosialisasi KIP-K ditunjukkan pada **Gambar 4**.



Gambar 4. Sosialisasi edukasi pendidikan (KIP-K)

Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme peserta melalui pertanyaan dan diskusi mengenai peluang melanjutkan pendidikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterbatasan partisipasi pendidikan tinggi dapat dipengaruhi oleh kurangnya informasi, bukan semata-mata rendahnya motivasi. Edukasi KIP-K dengan demikian berfungsi sebagai upaya memperluas literasi pendidikan sekaligus membangun kesadaran bahwa keterbatasan ekonomi tidak selalu menjadi penghalang apabila tersedia informasi dan skema bantuan yang tepat. Orientasi edukasi yang memperluas akses informasi tersebut selaras dengan gagasan pendidikan sebagai instrumen penguatan kapasitas dan kesempatan masa depan (UNESCO, 2021).

Dalam perspektif PAR, keberhasilan program tidak berhenti pada pelaksanaan sosialisasi. Refleksi menunjukkan bahwa pendampingan berkelanjutan tetap diperlukan melalui kerja sama antara pemerintah desa, sekolah, perguruan tinggi, dan pihak terkait. Oleh karena itu, program KIP-K dapat dikembangkan menjadi sistem pendampingan informasi pendidikan yang membantu calon mahasiswa memperoleh informasi secara berkelanjutan. Kebutuhan kolaborasi lintas aktor tersebut konsisten dengan pendekatan collaborative governance yang menekankan koordinasi, komunikasi, dan komitmen bersama antarpemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012).

Inisiasi Budaya Kerja Bakti sebagai Strategi Peningkatan Kesehatan Lingkungan Berbasis Partisipasi Masyarakat

Persoalan lingkungan di Desa Sumber Kemuning tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sarana, tetapi juga dengan belum terbentuknya kebiasaan kolektif dalam menjaga kebersihan. Pada awalnya,

pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif solusi. Namun, melalui refleksi bersama, tim menyadari bahwa pembangunan sarana tanpa sistem pengelolaan, pembiayaan, dan penanggung jawab yang jelas memiliki risiko keberlanjutan. Pendekatan kesehatan lingkungan menekankan bahwa perubahan kondisi sanitasi memerlukan kombinasi antara sarana, edukasi, dan perubahan perilaku masyarakat (Green & Kreuter, 2005; World Health Organization, 2022). Pelaksanaan kerja bakti bersama masyarakat ditunjukkan pada **Gambar 5**.



Gambar 5. Kerja bakti bersama masyarakat

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, intervensi diarahkan pada perubahan perilaku melalui kerja bakti, penataan lingkungan, dan pemasangan papan imbauan kebersihan. Kegiatan kerja bakti dilaksanakan di Dusun Gunung Malang dan Dusun Waduk. Selain membersihkan lingkungan, kegiatan tersebut menjadi ruang interaksi antara mahasiswa dan warga untuk memahami kebiasaan pengelolaan sampah serta kendala yang dihadapi masyarakat. Pendekatan berbasis partisipasi dan edukasi lingkungan sejalan dengan praktik pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama perubahan perilaku (Hafizoh et al., 2026; Udin et al., 2025). Dokumentasi pembersihan sampah di area waduk disajikan pada **Gambar 6**.



Gambar 6. Pembersihan sampah di area waduk

Kerja bakti memberikan dua manfaat sekaligus. Dari sisi lingkungan, kegiatan tersebut membantu membersihkan area yang membutuhkan penataan. Dari sisi sosial, kegiatan tersebut memperkuat interaksi, gotong royong, dan rasa tanggung jawab bersama. Papan imbauan kebersihan kemudian digunakan sebagai media pengingat yang relatif mudah dipelihara. Meskipun perubahan perilaku tidak terjadi secara instan, kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam membangun kebiasaan kolektif. Penguatan perilaku melalui edukasi dan keterlibatan sosial merupakan bagian penting dalam intervensi kesehatan berbasis masyarakat (Green & Kreuter, 2005; Udin et al., 2025).

Pengalaman ini menunjukkan bahwa keberhasilan program lingkungan tidak selalu ditentukan oleh pembangunan fisik. Dalam konteks PAR, keputusan untuk mengubah rencana pembangunan TPS menjadi program berbasis perilaku merupakan bentuk refleksi adaptif. Solusi dipilih berdasarkan kapasitas masyarakat untuk melanjutkannya setelah KKN berakhir. Dengan demikian, kerja bakti berfungsi bukan hanya sebagai kegiatan kebersihan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan modal sosial dan kesadaran

kolektif. Prinsip ini sesuai dengan PAR yang menekankan refleksi, adaptasi, dan keberlanjutan tindakan bersama masyarakat (Hafizoh et al., 2026; Wallerstein et al., 2018).

Pemetaan Spasial Inklusif sebagai Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Lokal

Desa Sumber Kemuning memiliki berbagai potensi UMKM yang belum terdokumentasi dan dipromosikan secara optimal. Sebagian pelaku usaha, termasuk kelompok usia lanjut, masih mengandalkan pemasaran konvensional. Kondisi tersebut membuat pendekatan digitalisasi yang kompleks belum selalu sesuai. Oleh karena itu, tim memilih strategi yang lebih sederhana dan inklusif melalui pemetaan spasial, penyusunan denah desa, serta papan informasi potensi UMKM pada setiap dusun. Pemilihan tingkat digitalisasi yang sesuai dengan kapasitas pelaku usaha penting agar transformasi UMKM berlangsung inklusif dan tidak menciptakan hambatan baru (OECD, 2021; UNCTAD, 2021).

Pemetaan dilakukan melalui observasi lapangan, identifikasi lokasi usaha, dan komunikasi dengan masyarakat serta perangkat desa. Proses ini menempatkan masyarakat sebagai pemilik pengetahuan lokal. Pendekatan pemetaan partisipatif menekankan pentingnya pengetahuan lokal, keterlibatan warga, dan representasi ruang yang dapat diakses oleh masyarakat (Brown & Kytä, 2018; Chambers, 2006; UN-Habitat, 2020). Informasi yang diperoleh kemudian digunakan untuk menyusun media informasi yang dapat membantu masyarakat dan pengunjung mengenali persebaran serta potensi usaha lokal.

Program tersebut memiliki beberapa fungsi. Pertama, meningkatkan visibilitas UMKM sehingga produk lokal lebih mudah ditemukan. Kedua, memperkuat identitas ekonomi desa dengan menampilkan potensi pada setiap wilayah. Ketiga, menyediakan basis data awal bagi pemerintah desa dalam menyusun kebijakan pengembangan ekonomi. Dengan demikian, pemetaan tidak hanya menghasilkan produk fisik, tetapi juga membangun pengalaman kolektif dalam mengenali dan mempromosikan aset lokal. Fungsi tersebut sejalan dengan pemetaan partisipatif yang dapat memperkuat akses informasi, representasi aset lokal, dan proses perencanaan berbasis masyarakat (Brown & Kytä, 2018; Chambers, 2006).

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Asset-Based Community Development (ABCD) yang menekankan pembangunan berbasis kekuatan masyarakat (Kretzmann & McKnight, 1993). Pengembangan UMKM tidak harus selalu dimulai dari bantuan modal atau digitalisasi kompleks. Penyediaan informasi yang mudah diakses dapat menjadi tahap awal untuk memperluas akses pasar dan memperkuat identitas ekonomi lokal. Ke depan, data tersebut dapat dikembangkan menjadi basis data UMKM yang diperbarui secara berkala dan diintegrasikan dengan media digital secara bertahap sesuai kapasitas masyarakat. Pengembangan bertahap tersebut konsisten dengan kebutuhan transformasi digital UMKM yang mempertimbangkan kemampuan, akses, dan kesiapan pelaku usaha (OECD, 2021; UNCTAD, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Sumber Kemuning menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah fondasi utama dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan. Melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR), masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga aktif dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, melaksanakan program, dan mengevaluasi hasil kegiatan. Pendekatan ini berhasil membangun hubungan kepercayaan antara mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi serta rasa memiliki terhadap setiap program yang dijalankan.

Implementasi program edukasi pendidikan melalui sosialisasi KIP-K berhasil meningkatkan literasi masyarakat mengenai akses pendidikan tinggi sebagai langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Di bidang kesehatan lingkungan, pembentukan budaya kerja bakti dan penyediaan media edukasi mampu menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Sementara itu, pemetaan spasial UMKM, penyusunan denah desa, dan papan informasi potensi ekonomi menjadi inovasi yang memperkuat promosi potensi lokal sekaligus mendukung pengembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pembangunan sarana fisik, tetapi lebih pada peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan modal sosial, perubahan perilaku, serta kolaborasi multisektoral. Integrasi antara edukasi,

partisipasi masyarakat, dan pengembangan potensi lokal menjadi strategi yang efektif dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa diharapkan dapat melanjutkan program edukasi pendidikan melalui pendampingan akses beasiswa dan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Selain itu, budaya kerja bakti yang telah terbentuk perlu dijadikan agenda rutin desa sebagai upaya menjaga kesehatan lingkungan. Pemerintah desa juga disarankan untuk mengembangkan basis data UMKM dan melakukan pembaruan informasi spasial secara berkala agar dapat dimanfaatkan sebagai media promosi dan perencanaan pembangunan ekonomi desa. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji dampak jangka panjang dari pendekatan PAR terhadap peningkatan kualitas SDM, perubahan perilaku masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga diperoleh model pemberdayaan masyarakat yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Baum, F., MacDougall, C., & Smith, D. (2006). Participatory Action Research. *Journal of Epidemiology & Community Health*, 60(10), 854–857. <https://doi.org/10.1136/jech.2004.028662>
- Brown, G., & Kyttä, M. (2018). Key issues and research priorities for public participation GIS (PPGIS): A synthesis based on empirical research. *Applied Geography*, 46, 122–136. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2013.11.004>
- Cargo, M., & Mercer, S. L. (2008). The value and challenges of participatory research. *Annual Review of Public Health*, 29, 325–350.
- Chambers, R. (2006). Participatory Mapping and Geographic Information Systems: Whose Map? Who is Empowered and Who Disempowered? *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 25(1), 1–11.
- Chandra, D., Rifai, A., & Dewi, E. K. (2026). Pendekatan Participatory Action Research (PAR) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Puskasari Kabupaten Ciamis. 8(2).
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). *Health Program Planning: An Educational and Ecological Approach*. McGraw-Hill.
- Hafizoh, N., Rachmanita, V., Maulidya, W. S., Irsyadilla, P., & Anto, A. H. F. (2026). Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan lingkungan melalui participatory action research.
- Harahap, S., Harahap, R., Siregar, P., Harahap, R. M. S., Siregar, M. H., Amandasari, C., & Siregar, W. (2025). Implementasi Program KKN dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sialaman: (Studi Kualitatif pada Aspek Kesehatan, Pendidikan, UMKM dan Lingkungan). *SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 6(1), 21–33. <https://doi.org/10.56910/safari.v6i1.3386>
- Jagosh, J. (2012). Uncovering the Benefits of Participatory Research: Implications of a Realist Review for Health Research and Practice. *The Milbank Quarterly*, 90(2), 311–346. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2012.00665.x>
- Morgan, P. (2006). *The Concept of Capacity*. European Centre for Development Policy Management (ECDPM).
- OECD. (2021). *The Digital Transformation of SMEs*. OECD Publishing.
- Pain, R., Whitman, G., & Milledge, D. (2011). *Participatory Action Research Toolkit*. Durham University.
- Reason, P., & Bradbury, H. (2008). *The SAGE Handbook of Action Research*. SAGE Publications.
- Udin, T., Muslihudin, & Sibawaih, I. (2025). Pemberdayaan orang tua dalam edukasi pengelolaan sampah: Dari rumah menuju komunitas berbasis lingkungan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 6(2), 394–408. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v6i2.23455>
- UN-Habitat. (2020). *Participatory Slum Upgrading Programme: Participatory Mapping for Inclusive Urban Development*. UN-Habitat.

- UNCTAD. (2021). *Digital Economy Report 2021*. United Nations.
- UNESCO. (2021). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. UNESCO Publishing.
- Wallerstein, N., Duran, B., Oetzel, J., & Minkler, M. (2018). *Community-Based Participatory Research for Health: Advancing Social and Health Equity*. Jossey-Bass.
- World Health Organization. (2022). *Guidelines on Sanitation and Health*. WHO.
- Yusri, A. (2022). Does Government Expenditure Affect Poverty, Health, and Education? Evidence from Aceh, Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 6(1). <https://doi.org/10.36574/jpp.v6i1.249>